

Manajemen Keuangan Penerimaan Peserta Didik Baru di Pondok Pesantren Al-Ma'mur

Indah Rosiana, Aulia Nursekha
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: Indahrosiana964@gmail.com

Abstract

This article aims to describe and analyze financial management in the New Student Admission (PPDB) process at Pondok Pesantren Al-Ma'mur, covering budget planning, fundraising, fund utilization, as well as reporting and accountability systems. This study employs a qualitative-descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of PPDB financial documents. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that financial management of PPDB at Pondok Pesantren Al-Ma'mur has been implemented systematically through four main stages: planning, organizing, implementation, and evaluation. The budget planning system is based on applicant projections; organizational management involves a clearly defined committee structure; fund receipt mechanisms utilize a coded receipt system; and financial reporting is conducted periodically (daily, weekly, and final reports). Effective PPDB financial management plays a crucial role in maintaining transparency, accountability, and operational stability of the pesantren, while also enhancing public trust. However, the digitalization of payment systems and the improvement of human resource capacity remain challenges that need to be addressed to further enhance the effectiveness of PPDB financial management.

Keywords: Financial Management, Student Admission, Islamic Boarding School, Transparency, Accountability

A. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat serta memiliki kontribusi historis dan strategis dalam sistem pendidikan nasional. Sejak awal kemunculannya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai institusi pembentukan karakter, nilai moral, dan kemandirian sosial¹. Dalam dinamika pendidikan modern, peran pesantren semakin kompleks karena harus beradaptasi dengan tuntutan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan.

¹ Sadali Sadali, "Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 53–70.

Seiring berkembangnya sistem pendidikan nasional dan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan, pesantren dituntut untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara lebih efektif dan efisien². Pengelolaan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek kurikulum dan pembelajaran, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta keuangan. Aspek keuangan menjadi salah satu elemen krusial karena berperan langsung dalam menjamin keberlangsungan operasional pesantren dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada santri³.

Salah satu aktivitas kelembagaan yang memiliki implikasi finansial signifikan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB bukan sekadar proses administratif penerimaan santri, melainkan merupakan pintu masuk utama bagi pengelolaan keuangan pada awal tahun ajaran⁴. Dana yang dihimpun melalui proses PPDB menjadi modal awal bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pembiayaan berbagai program pendukung pembelajaran. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan PPDB memiliki dampak langsung terhadap stabilitas anggaran dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan pesantren⁵.

Pondok Pesantren Al-Ma'mur yang berlokasi di Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, merupakan salah satu pesantren modern yang berupaya menjawab tantangan tersebut. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal dan keagamaan secara terpadu pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Islam, dan Madrasah Aliyah. Dengan visi mencetak generasi beriman kuat, berilmu luas, dan beramal shalih, Pondok Pesantren Al-Ma'mur berupaya mengintegrasikan penguatan nilai-nilai keislaman dengan pengelolaan kelembagaan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Upaya tersebut tercermin dalam pengelolaan keuangan PPDB yang disusun secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, dalam praktiknya pengelolaan keuangan PPDB di pesantren ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan digitalisasi sistem pembayaran dan pencatatan keuangan, serta kebutuhan

² Rafika Lutfiyah et al., "Manajemen Pesantren Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Di Era Modren," *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 1068–76.

³ Shelve Famella et al., *Kajian Pengelolaan Sistem Pendidikan* (CV. Gita Lentera, 2024).

⁴ Alber Derry Asher, "Pengembangan Sistem Informasi PPDB Di Pesantren" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁵ Atun Ariani, Sulung Aji Pangestu, and Nurfuadi Nurfuadi, "MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN MUTU DI SMK," *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 5, no. 1 (2025): 117–31.

penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi keuangan⁶. Tantangan ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola keuangan pesantren merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan pengembangan secara terus-menerus.

Berangkat dari konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen keuangan PPDB di Pondok Pesantren Al-Ma'mur. Fokus kajian diarahkan pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang diterapkan. Selain itu, artikel ini juga menelaah sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan PPDB sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pesantren yang profesional dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan PPDB dalam konteks alamiah pesantren. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses PPDB, wawancara dengan pimpinan pesantren, pengelola PPDB, dan bendahara, serta telaah dokumen keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan dana PPDB. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai sistem manajemen keuangan PPDB yang diterapkan

C. Pembahasan

1. Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dan penggunaan dana dalam sistem persekolahan atau lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan ini mencakup serangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan penggunaan dana agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien⁷.

Dalam praktiknya, manajemen keuangan pendidikan tidak hanya berfokus pada bagaimana dana diperoleh dan digunakan, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut ditatausahakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara sistematis⁸. Proses ini menuntut adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tertib, serta sistem

⁶ Yosi Sisri Nengsi et al., "Pengelolaan Keuangan Sekolah: Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Dalam Satuan Pendidikan," *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan* 2, no. 1 (2025): 144–62.

⁷ M S Syaifullah, "Manajemen Keuangan Pendidikan," *Scolae: Journal of Pedagogy* 4, no. 1 (2021).

⁸ Nengsi et al., "Pengelolaan Keuangan Sekolah: Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Dalam Satuan Pendidikan."

pencatatan dan pelaporan yang jelas agar pengelolaan keuangan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan keuangan pendidikan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Transparansi diperlukan untuk menjamin keterbukaan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana, sedangkan akuntabilitas menjadi dasar pertanggungjawaban pengelola keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan. Di samping itu, efektivitas dan efisiensi juga menjadi prinsip penting agar setiap penggunaan dana benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan dengan meminimalkan pemborosan sumber daya..

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

Prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan menjadi landasan penting dalam menjamin tercapainya tujuan pendidikan secara berkelanjutan. Salah satu prinsip utama adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan. Transparansi memungkinkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami sumber dana, besaran dana yang dikelola, serta peruntukannya, sehingga dapat mendorong kepercayaan dan partisipasi publik terhadap lembaga pendidikan⁹.

Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas, yang menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pendidikan yang telah ditetapkan¹⁰.

Selain itu, efisiensi menjadi prinsip yang tidak kalah penting dalam manajemen keuangan pendidikan. Efisiensi menekankan pada penggunaan sumber daya keuangan secara optimal, yaitu bagaimana dana yang terbatas dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan dituntut mampu meminimalkan pemborosan tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Prinsip efektivitas melengkapi keseluruhan proses pengelolaan keuangan pendidikan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana pengelolaan keuangan mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pengelolaan keuangan yang efektif tercermin dari kesesuaian antara rencana,

⁹ Nurul Citra Lestari, Reffy Ananda Rizki, and Nazwatul Padilah, "Manajemen Keuangan Dalam Pendidikan Agama Islam," *EDUMULYA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 79–91.

¹⁰ Ihsanul Windasari, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam," *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 10–25.

pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, sehingga setiap penggunaan dana benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan¹¹.

3. Konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan proses awal dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk menerima calon peserta didik agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran baru. PPDB menjadi tahap fundamental karena menentukan keberlangsungan proses pendidikan selanjutnya, baik dari sisi administratif, akademik, maupun manajerial. Keberhasilan pelaksanaan PPDB berimplikasi langsung terhadap kelancaran kegiatan pembelajaran, stabilitas pengelolaan lembaga, serta kesiapan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan¹².

Dalam konteks pesantren, PPDB tidak hanya dimaknai sebagai proses administrasi pendaftaran dan seleksi santri, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam pengelolaan kelembagaan. PPDB menjadi pintu masuk utama bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan awal tahun ajaran, karena dana yang dihimpun melalui proses ini berfungsi sebagai modal awal untuk mendukung operasional pendidikan, penyediaan sarana prasarana, serta pelaksanaan program pembinaan santri. Oleh karena itu, PPDB di pesantren memiliki keterkaitan erat dengan sistem manajemen keuangan yang diterapkan¹³.

Sumber pendanaan yang diperoleh melalui PPDB pada lembaga pendidikan Islam umumnya berasal dari berbagai komponen pembiayaan yang ditetapkan oleh lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Sumber-sumber tersebut dapat berupa dana yang berkaitan dengan proses pendaftaran, daftar ulang, pengadaan seragam dan perlengkapan santri, pengembangan fasilitas pendidikan, serta pembiayaan asrama bagi pesantren yang menerapkan sistem boarding. Selain itu, dalam beberapa kasus, PPDB juga menjadi sarana penghimpunan sumbangan pengembangan lembaga yang digunakan untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan.

Pengelolaan keuangan yang bersumber dari PPDB memerlukan sistem manajemen yang terstruktur dan berkelanjutan. Proses pengelolaan tersebut mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan¹⁴. Perencanaan dilakukan dengan menyusun proyeksi

¹¹ M M DR HA Rusdiana, H Wardija, and M AP, *MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH: Konsep Prinsip Dan Aplikasinya Di Sekolah/Madrasah* (Arsad Press, 2022).

¹² Umi Songidah NIM, "Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Mi Kuripan Kidul Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan" (IAINU Kebumen, 2022).

¹³ Asher, "Pengembangan Sistem Informasi PPDB Di Pesantren."

¹⁴ Lilis Istiana, Putri Nur Arindah, and Azahratul Firdausiyah, "Implementasi Manajemen Anggaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di SMA Negeri 12 Semarang," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).

pendapatan dan alokasi belanja berdasarkan kebutuhan riil lembaga dan jumlah peserta didik yang diterima. Pengorganisasian diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan. Tahap pelaksanaan mencakup pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, sedangkan evaluasi dan pertanggungjawaban dilakukan melalui pengawasan dan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, PPDB tidak dapat dipisahkan dari sistem manajemen keuangan pendidikan secara keseluruhan. PPDB yang dikelola secara terencana, transparan, dan akuntabel akan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan lembaga, efektivitas pelaksanaan program pendidikan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang profesional dan berkelanjutan.

4. Perencanaan Keuangan PPDB di Pondok Pesantren Al-Ma'mur

Perencanaan keuangan merupakan tahap awal dan paling fundamental dalam manajemen keuangan PPDB di Pondok Pesantren Al-Ma'mur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan sebelum proses PPDB dibuka melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berbasis data. Langkah awal yang dilakukan pesantren adalah menyusun proyeksi jumlah calon santri baru dengan mengacu pada data pendaftar tiga hingga lima tahun terakhir, perkembangan tren pendaftar, serta kapasitas asrama yang tersedia. Penerapan sistem pendaftaran dalam tiga gelombang memungkinkan pesantren untuk memetakan distribusi pendaftar secara lebih akurat, sehingga perencanaan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efisien dan terukur. Proyeksi jumlah pendaftar ini menjadi dasar utama dalam menghitung potensi penerimaan dana serta merancang alokasi penggunaan anggaran PPDB.

Berdasarkan proyeksi tersebut, pesantren selanjutnya melakukan perhitungan kebutuhan operasional awal tahun ajaran secara rinci. Kebutuhan yang dihitung meliputi pengadaan alat tulis kantor, perlengkapan ruang kelas dan asrama, kebutuhan kebersihan dan sanitasi, biaya pelaksanaan orientasi santri baru, serta biaya administrasi dan dokumentasi kegiatan PPDB. Perhitungan kebutuhan ini disesuaikan dengan jumlah santri baru yang diproyeksikan dan kondisi fasilitas yang dimiliki pesantren, seperti asrama putra dan putri, ruang kelas, laboratorium, balai latihan kerja, masjid dan musholla, gedung serba guna, saung, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dengan pendekatan tersebut, pesantren berupaya memastikan bahwa

seluruh kebutuhan awal tahun ajaran dapat terpenuhi tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.

Tahap berikutnya dalam perencanaan keuangan PPDB adalah penetapan komponen biaya yang harus dipenuhi oleh calon santri. Pondok Pesantren Al-Ma'mur menerapkan kebijakan biaya masuk PPDB secara gratis sebagai bentuk komitmen dalam memperluas akses pendidikan Islam bagi masyarakat. Kebijakan ini mencakup pembebasan biaya pendaftaran dan biaya daftar ulang. Meskipun demikian, calon santri tetap diwajibkan memenuhi biaya perlengkapan yang dibutuhkan selama mengikuti proses pendidikan di pesantren, seperti seragam, perlengkapan asrama, dan buku pembelajaran. Penetapan komponen biaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, keterjangkauan, serta kebutuhan riil operasional pesantren. Kebijakan pembebasan biaya masuk ini menunjukkan upaya pesantren dalam menjaga keseimbangan antara misi sosial pendidikan dan keberlanjutan pengelolaan keuangan lembaga¹⁵.

5. Pengorganisasian Pengelolaan Keuangan PPDB

Pengorganisasian merupakan tahap penting dalam manajemen keuangan PPDB karena menentukan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar pihak yang terlibat. Di Pondok Pesantren Al-Ma'mur, pengelolaan keuangan PPDB dilaksanakan melalui struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis dan fungsional, dengan melibatkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi serta pengalaman dalam pengelolaan kelembagaan. Pimpinan pondok pesantren berperan sebagai penentu kebijakan strategis PPDB, termasuk dalam penetapan kebijakan biaya masuk gratis serta pemberian persetujuan terhadap rencana anggaran yang disusun. Selain itu, pimpinan juga menjalankan fungsi supervisi untuk memastikan seluruh proses PPDB berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan PPDB dikoordinasikan oleh pengasuh pesantren yang sekaligus bertindak sebagai koordinator PPDB¹⁶. Pada posisi ini, tanggung jawab utama meliputi pengendalian keseluruhan proses PPDB, koordinasi antarbagian, serta pengambilan keputusan operasional yang bersifat teknis. Koordinator PPDB bekerja sama secara intensif dengan ketua panitia PPDB yang memimpin panitia pelaksana harian. Ketua panitia bertanggung jawab mengoordinasikan proses pendaftaran, verifikasi administrasi

¹⁵ Yudha Catur Pamungkas, Lilik Hamidah, and Ryan Purnomo, "Problematisasi Ekonomi Dalam Dakwah: Studi Realita Akses Pendidikan Di Pondok Pesantren Dan Dampak Biaya," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 4 (2024): 38–48.

¹⁶ Maulida Fu'adatus Sultoniya, Ajat Rukajat, and Khalid Ramadhani, "Manajemen Kepala Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMPIT Istiqomah Global School Karawang Tahun Pelajaran 2022/2023," *AS-SABIQUN* 4, no. 3 (2022): 527–47.

calon santri, serta memastikan pelayanan PPDB berjalan optimal dan konsisten selama masa penerimaan¹⁷.

Dalam aspek keuangan, peran bendahara PPDB menjadi elemen kunci dalam menjaga ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan dana¹⁸. Bendahara PPDB bertanggung jawab atas penerimaan dan penyimpanan dana perlengkapan santri, pencatatan seluruh transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan secara berkala, serta koordinasi dengan bendahara umum pesantren. Untuk mendukung kelancaran proses pembayaran, bagian administrasi pembayaran bertugas melayani transaksi keuangan calon santri dan wali santri, menerbitkan bukti pembayaran berupa kwitansi, melakukan verifikasi pembayaran, serta menginput data transaksi ke dalam sistem pencatatan keuangan. Bagian ini menjadi garda terdepan dalam interaksi keuangan antara pesantren dan masyarakat¹⁹.

Sebagai bentuk penguatan pengendalian internal, pesantren juga membentuk bagian verifikasi dan pelaporan yang bertugas memeriksa kelengkapan pembayaran perlengkapan santri, memverifikasi persyaratan administrasi calon santri, menyusun rekapitulasi keuangan harian dan mingguan, serta mencocokkan antara fisik dana yang diterima dengan catatan pembukuan. Keberadaan bagian ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang memastikan akurasi data, ketertiban administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PPDB. Struktur organisasi yang jelas dan pembagian peran yang tegas tersebut menjadikan proses pengelolaan keuangan PPDB di Pondok Pesantren Al-Ma'mur lebih tertib, terkoordinasi, dan akuntabel.

6. Mekanisme Penerimaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana PPDB

Mekanisme penerimaan dana merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan PPDB karena berkaitan langsung dengan ketertiban administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan²⁰. Di Pondok Pesantren Al-Ma'mur, penerimaan dana PPDB dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pembayaran langsung di loket administrasi dan pembayaran melalui transfer bank. Pembayaran langsung

¹⁷ Rismila Syafiqah, "Manajemen Penerimaan Siswa Baru Berbasis Daring Di Smk Darussalam Karangpucung Cilacap" (IAIN Purwokerto, 2020).

¹⁸ Mustabsyirah Mustabsyirah and Mardiyawati Mardiyawati, "Strategi Efektif Dalam Pengelolaan Dana Sekolah Yang Inspiratif Dan Berkelanjutan Di UPTD SMP Negeri 37 Sinjai," *Jurnal Studi Edukasi Integratif* 1, no. 3 (2024): 151–60.

¹⁹ ULFAH Isti'adah, "Manajemen Keuangan Di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas," *Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2024.

²⁰ Jeni Rotua Lastiur Simbolon, Sindi Marsya Utami, and Agus Lestari, "Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Mutu Layanan Pendidikan," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8514–21.

dilayani di Sekretariat Penerimaan Santri Baru dengan waktu pelayanan yang fleksibel, sehingga memudahkan calon santri dan wali santri. Mengingat kebijakan biaya pendaftaran dan daftar ulang yang digratiskan, transaksi keuangan lebih difokuskan pada pembayaran perlengkapan santri sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap transaksi, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui transfer, dicatat secara tertib dan disertai dengan penerbitan kwitansi resmi.

Untuk menjaga ketertiban pencatatan dan memudahkan pengawasan, pesantren menerapkan sistem kwitansi berkode unik. Kode tersebut memuat informasi penting terkait transaksi, seperti waktu pembayaran, jenis pembayaran, dan identitas pembayar. Sistem ini mempermudah proses pelacakan data, penyusunan laporan, serta pengendalian internal apabila terjadi ketidaksesuaian antara catatan dan dana yang diterima. Mekanisme penerimaan dana yang tertata ini menunjukkan upaya pesantren dalam membangun sistem keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan²¹.

Dana PPDB yang terkumpul selanjutnya digunakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Penggunaan dana difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional awal tahun ajaran, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas asrama, pelaksanaan kegiatan orientasi santri baru, serta pembiayaan penunjang pendidikan lainnya. Alokasi dana dilakukan secara proporsional untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, pembinaan santri, serta penyediaan lingkungan pendidikan yang layak dan kondusif. Seluruh penggunaan dana diawasi oleh bendahara dan pimpinan pesantren untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan kebutuhan riil dan tidak menyimpang dari perencanaan²².

Kebijakan pembebasan biaya pendaftaran dan daftar ulang yang diterapkan Pondok Pesantren Al-Ma'mur merupakan strategi sosial untuk memperluas akses pendidikan Islam yang berkualitas bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan tersebut menuntut pesantren untuk mengelola keuangan secara lebih cermat. Untuk menjaga keberlanjutan operasional, pesantren mengembangkan strategi diversifikasi sumber pendanaan melalui pengelolaan dana perlengkapan santri yang efisien, dukungan donatur dan alumni, pengembangan wakaf produktif, serta optimalisasi unit usaha pesantren. Strategi ini menunjukkan keseimbangan antara misi sosial pendidikan dan tuntutan keberlanjutan kelembagaan.

²¹ Nurul Khasanah, "Desain Sistem Informasi Pembayaran Spp Pada Asrama Putri Ummul Qurro'Wal Huffadz Yogyakarta" (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, 2024).

²² Puja Adilah, Jumira Warlizasusi, and Arsil Arsil, "Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pondok Pesantren Al-Ma'mur menerapkan sistem pelaporan keuangan PPDB yang dilakukan secara berjenjang dan berkala. Laporan disusun mulai dari rekapitulasi harian untuk memantau arus kas, laporan mingguan sebagai bahan evaluasi pimpinan, hingga laporan final setelah seluruh rangkaian PPDB selesai. Laporan akhir memuat ringkasan penerimaan, penggunaan dana, saldo akhir, serta evaluasi pelaksanaan PPDB sebagai dasar perbaikan pada tahun berikutnya. Sistem pelaporan ini disusun secara terbuka dan menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pesantren.

Meskipun sistem manajemen keuangan PPDB telah berjalan cukup baik, pesantren masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek digitalisasi dan kapasitas sumber daya manusia. Proses pembayaran yang masih didominasi metode manual serta keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan²³. Oleh karena itu, penguatan sistem pembayaran berbasis digital, penggunaan aplikasi pencatatan keuangan, peningkatan kompetensi panitia melalui pelatihan, serta pengembangan infrastruktur teknologi menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pengelolaan keuangan PPDB di masa mendatang

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Pondok Pesantren Al-Ma'mur Tahun Pelajaran 2026/2027 telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Perencanaan keuangan disusun berbasis proyeksi jumlah pendaftar dan kebutuhan operasional riil pesantren, disertai kebijakan biaya masuk gratis sebagai strategi perluasan akses pendidikan Islam.

Pengorganisasian pengelolaan keuangan PPDB didukung oleh struktur kepanitiaan yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas, sehingga proses pengelolaan dana berjalan tertib dan akuntabel. Mekanisme penerimaan dan penggunaan dana dilakukan secara terkontrol melalui pencatatan yang rapi serta pengalokasian dana sesuai rencana anggaran untuk mendukung operasional awal, fasilitas pesantren, dan program pembinaan santri. Sistem pelaporan keuangan yang dilakukan secara berkala turut memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

²³ Nadia Afkarina et al., "Cooperative Digitalization Development Strategy at Baitul Hikmah Islamic Boarding School," *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 7, no. 1 (2025): 11–20.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan keuangan PPDB masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek digitalisasi sistem pembayaran, kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi keuangan digital, serta keberlanjutan pembiayaan akibat kebijakan biaya masuk gratis. Oleh karena itu, penguatan sistem keuangan berbasis teknologi dan diversifikasi sumber pendanaan menjadi kebutuhan strategis agar manajemen keuangan PPDB semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan..

Referensi

- Adilah, Puja, Jumira Warlizasusi, and Arsil Arsil. "Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- Afkarina, Nadia, Vika Magfiroh, Moh Haris Agustian, and Sulfan Andreansyah Hakiki. "Cooperative Digitalization Development Strategy at Baitul Hikmah Islamic Boarding School." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 7, no. 1 (2025): 11–20.
- Ariani, Atun, Sulung Aji Pangestu, and Nurfuadi Nurfuadi. "MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN MUTU DI SMK." *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 5, no. 1 (2025): 117–31.
- Asher, Alber Derry. "Pengembangan Sistem Informasi PPDB Di Pesantren." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- DR HA Rusdiana, M M, H Wardija, and M AP. *MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH: Konsep Prinsip Dan Aplikasinya Di Sekolah/Madrasah*. Arsad Press, 2022.
- Famella, Shelvie, Susardi Susardi, Rafli Zedong Sitohang, Idha Arofatur Budiarti, M Haris, Yusmita Yusmita, Adinar Adinar, Lasri Susanti, Siti Aisyah, and Muhammad Amin Alfazli. *Kajian Pengelolaan Sistem Pendidikan*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Isti'adah, ULFAH. "Manajemen Keuangan Di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas." *Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2024.
- Istiana, Lilis, Putri Nur Arindah, and Azahratul Firdaussiyah. "Implementasi Manajemen Anggaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di SMA Negeri 12 Semarang." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).
- Khasanah, Nurul. "Desain Sistem Informasi Pembayaran Spp Pada Asrama Putri Ummul Qurro'Wal Huffadz Yogyakarta." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, 2024.
- Lestari, Nurul Citra, Reffy Ananda Rizki, and Nazwatul Padilah. "MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *EDUMULYA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 79–91.
- Lutfiyah, Rafika, Chairunnisa Salsabila Putri Septriani, Hasfi Fiqri Hidayah, and Muhammad Iqbal. "Manajemen Pesantren Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Di Era Modren." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 1068–76.
- Mustabsyirah, Mustabsyirah, and Mardyawati Mardyawati. "Strategi Efektif Dalam

- Pengelolaan Dana Sekolah Yang Inspiratif Dan Berkelanjutan Di UPTD SMP Negeri 37 Sinjai.” *Jurnal Studi Edukasi Integratif* 1, no. 3 (2024): 151–60.
- Nengsi, Yosi Sisri, Difa Maulidika, Ahmad Sabri, and Rully Hidayatullah. “Pengelolaan Keuangan Sekolah: Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Dalam Satuan Pendidikan.” *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan* 2, no. 1 (2025): 144–62.
- NIM, Umi Songidah. “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Mi Kuripan Kidul Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” IAINU Kebumen, 2022.
- Pamungkas, Yudha Catur, Lilik Hamidah, and Ryan Purnomo. “Problematisa Ekonomi Dalam Dakwah: Studi Realita Akses Pendidikan Di Pondok Pesantren Dan Dampak Biaya.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 4 (2024): 38–48.
- Sadali, Sadali. “Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam.” *Atta’dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 53–70.
- Simbolon, Jeni Rotua Lastiur, Sindi Marsya Utami, and Agus Lestari. “Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Mutu Layanan Pendidikan.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8514–21.
- Sultoniya, Maulida Fu’adatus, Ajat Rukajat, and Khalid Ramadhani. “Manajemen Kepala Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMPIT Istiqomah Global School Karawang Tahun Pelajaran 2022/2023.” *AS-SABIQUN* 4, no. 3 (2022): 527–47.
- Syafiq, Rismila. “Manajemen Penerimaan Siswa Baru Berbasis Daring Di Smk Darussalam Karangpucung Cilacap.” IAIN Purwokerto, 2020.
- Syaiful, M S. “Manajemen Keuangan Pendidikan.” *Scolae: Journal of Pedagogy* 4, no. 1 (2021).
- Windasari, Ihsanul. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam.” *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 10–25.